

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan bernegara dalam Indonesia semakin terbuka, pemerintah sebagai perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban pemerintah daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah setiap awal tahun anggaran menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan gambaran tentang rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran. Selanjutnya pada setiap akhir tahun anggaran pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan

sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelola keuangan daerah selama satu periode.

Badan Penadapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah yaitu menyampaikan laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara umum. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan di dukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. Oleh karena itu, dikeluarkan seperangkat peraturan untuk mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai upaya untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang cepat, akurat, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Keputusan Bupati Gresik Nomor 900//HK/437.12/2011 membentuk tim pelaksana teknis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan efektivitas dan mengoptimalkan kinerja Operasional Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kabupaten Gresik.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan seperangkat alat terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Kabupaten Gresik mulai menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), hal ini dilakukan agar

memudahkan para staf akuntansi SKPD yang melakukan penginputan data-data dokumen keuangan tidak perlu repot datang ke setdako gresik cukup mengakses aplikasi di kantor masing-masing. Pelaksanaan implementasi SIPKD di kabupaten gresik tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam prosesnya, sehingga dalam prosesnya akan terjadi kesalahan dalam meng-input data untuk tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan terhambatnya dalam menginput data.

Penelitian dalam tugas akhir Berdasarkan kendala terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, atas dasar itu saya mengambil judul “Analisis Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan Dengan Menerapkan E-Sistem Pada BPPKAD Kabupaten Gresik” dengan tujuan untuk mengukur efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan auditabel secara efektif di Kabupaten Gresik.

1.2 Penjelasan Judul

Usulan dalam judul “Analisis Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan Dengan Menerapkan E-Sistem Pada BPPKAD Kabupaten Gresik”

1. Efektivitas

efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya

2. Laporan keuangan

Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

3. E-sistem

E-sistem dalam BPPKAD adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yaitu aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan.

4. BPPKAD Kabupaten Gresik.

BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik merupakan objek penelitian dari peneliti.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian Tugas Akhir adalah

1. Apakah dengan menggunakan SIPKD dapat memberikan efektivitas dalam penyusunan laporan keuangan

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gresik dengan menerapkan SIPKD dapat memberi efektivitas.
2. Mengetahui kendala dalam penyusunan laporan keuangan dengan menerapkan e-sistem di pemerintah daerah Kabupaten Gresik.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini antara lain :

1. Bagi Peneliti : melalui penelitian ini Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan terutama dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya mengenai pencatatan dengan sistem informasi pengelola keuangan daerah dan penyusunan pelaporan keuangan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
2. Bagi STIE Perbanas Surabaya : hasil penelitian ini diharapkan menambah literature di perpustakaan, sehingga dapat digunakan sebagai perbandingan untuk penelitian dimasa yang akan datang terutama pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem.
3. Bagi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi implementasi Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah..
4. Bagi peneliti selanjutnya : dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang menggunakan topik sejenis.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada bidang akuntansi dan pertanggung jawaban, bagian bendahara pengeluaran, Pejabat Penatausahaan keuangan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Gresik yang menggunakan sistem informasi keuangan daerah atau biasa disebut SIPKD. Penentuan kabupaten ini sebagai bahan penelitian apakah sepenuhnya Badan

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menggunakan sistem informasi keuangan Daerah dalam penyusunan laporan keuangan.

1.6.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer didapatkan dengan wawancara secara langsung, menggunakan teknik kuisisioner dan dokumentasi ke Sumber Data dari pengguna Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

1.6.2. Pengumpulan Data

Populasi dari penelitian ini adalah staff yang ada di bidang akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan, bidang bendahara pengeluaran dan pejabat penatausahaan keuangan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Gresik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung, memberikan kuisisioner dengan persetujuan dari kesekretariatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penelitian dilakukan melalui *interview* untuk mengetahui sejauh mana sistem informasi yang digunakan mampu menghasilkan LKPD secara efektif.

1.6.3 Ruang Lingkup

Fokus penelitian ini adalah terhadap sistem informasi, baik SIPKD, yang digunakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Gresik dalam menghasilkan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh BPPKAD terdiri dari empat bagian laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penelitian dilakukan melalui *interview* untuk mengetahui

sejauh mana sistem informasi yang digunakan mampu menghasilkan Laporan Keuangan secara efektif. Sebelum SIPKD banyak digunakan di pemerintah daerah dengan menggunakan aplikasi excel dalam menyusun Laporan Keuangan. Aplikasi tersebut didasarkan pada PP 24 tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang masih berbasis Kas Menuju Akrua. Oleh karena pada tahap awal penerapan akuntansi berbasis akrual ini, diperkirakan sistem informasi yang digunakan pemerintah daerah juga belum mampu membuat sesuai kebutuhan, maka fokus dari penelitian ini adalah menganalisis penyusunan laporan keuangan dengan mendapatkan data dari aplikasi SIPKD yang mampu mengimplementasikan akuntansi akrual secara mudah dan tepat.

1.6.4 Teknik Analisis

Teknik pada analisis dalam penelitian ini yaitu meliputi

1. Wawancara kepada bagian kesekretariatan di DPPKAD kabupaten Gresik, berikut adalah kisi-kisi seputar kuisioener yang akan digunakan dalam wawancara pada pengguna sipkd dalam menyusun laporan keuangan :
 - a. Apakah dengan menggunakan SIPKD memudahkan bagi staff dalam melakukan penyusunan laporan keuangan ?
 - b. Apakah ada kendala saat menggunakan SIPKD selama ini?
 - c. Apakah dengan menggunakan SIPKD dapat membantu dari keamanan data apabila terjadi sesuatu yang tak diinginkan yang berhubungan dengan bencana atau kesalahan dari *human error*?

- d. Apakah dengan menggunakan SIPKD dapat mewakili semua dari pekerjaan dalam memudahkan penyusunan laporan keuangan?
 - e. Bagaimana pendapat anda selama menggunakan SIPKD dalam melakukan penyusunan laporan keuangan?
 - f. Bagaimana penyusunan laporan keuangan di BPPKAD ?
 - g. Apakah dengan menggunakan SIPKD dalam menyajikan laporan dapat menunjukkan kesesuaian dengan standar akuntansi ?
2. Setelah melakukan wawancara, peneliti menyebarkan kuesioner kepada empat puluh responden pada bidang bendahara pengeluaran, pejabat penatausahaan keuangan dan akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan untuk mengukur efektivitas penyusunan laporan keuangan dari pengguna e-sitem tersebut.
 3. Langkah selanjutnya setelah memperoleh data dari tersebut peneliti akan merangkum dari rangkaian data yang telah ditelaah dan dianalisa tersebut sehingga menjadi penelitian tugas akhir untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam perkuliahan.